

Berita Perdagangan bersumber dari artikel dan liputan dari dalam Depdag atau dari luar Depdag, berbagai tulisan di berbagai media lokal dan asing, kawat berita dari berbagai Perwakilan RI di luar negeri, dan informasi dari instansi/dinas perdagangan di daerah. Materi disunting dan diolah kembali oleh *Staf Komunikasi Pimpinan* pada *Pusat Humas Departemen Perdagangan*.

WTO Tegaskan Peran Penting *Aid for Trade* bagi Perdagangan Dunia

Jenewa, 19 Juni 2009 — Dirjen WTO Pascal Lamy menekankan pentingnya peran *Aid for Trade* dalam memfasilitasi negara-negara berkembang memulihkan perekonomian, terutama dalam situasi krisis global saat ini. Hal ini diutarakan Lamy dalam laporannya di tengah Sidang *Committee on Trade and Development (CTD) – Session on Aid of Trade* yang dipimpin Ketua CTD, Dubes Shree Baboo Chekitan Servansing (Mauritius), di Markas Besar WTO Jenewa pada 11 Juni 2009. Bahkan, pada KTT G-20 di London pada awal April tahun lalu, para pemimpin negara-negara G-20 memberikan bobot politis cukup tinggi terhadap *Aid for Trade* dalam kerangka pemulihan ekonomi global.

Keberadaan *Aid for Trade (Aft)*, masih menurut Lamy, harus memainkan peran efektif dan tepat sasaran: (1) menguatkan dimensi regional dengan melibatkan *regional partners* semisal bank pembangunan regional yang ada di sejumlah kawasan; (2) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan inisiatif *Aft*; (3) melakukan evaluasi dampak *Aft* terhadap kegiatan perdagangan; dan (4) memobilisasi sumber dana tambahan baru dari donor untuk melengkapi sumber pembiayaan yang telah ada.

Lebih lanjut, terkait rencana penyelenggaraan *2nd Global Review of Aid for Trade* pada 6-7 Juli 2009, Lamy menyampaikan, acara tersebut akan menjadi forum evaluasi terhadap semua langkah yang sudah dilaksanakan setelah *review* pertama pada November 2007. Fokus akan diarahkan pada isu memertahankan ketersediaan sumber dana untuk *Aft* pada saat krisis ekonomi.

Dalam konteks ini, Indonesia berkepentingan besar dalam pembahasan isu *Aft* di berbagai forum internasional. Karenanya perlu diperhatikan bahwa *Aft* tidak menjadi substitusi implementasi mandat pembangunan Putaran Doha WTO. Peran *Aft* lebih merupakan pelengkap karena mandat pembangunan Doha hanya dapat dicapai melalui hasil perundingan di semua isu *single undertaking* secara adil, seimbang, dan proporsional. Pemberian *Aft* kepada negara berkembang dan LDCs bukanlah merupakan *trade-off* hasil perundingan Putaran Doha, khususnya pembukaan akses pasar yang menjadi kepentingan utama negara maju.

Negara penerima seyogianya memiliki andil dan keleluasaan besar dalam menyusun dan melaksanakan program bantuan sesuai skala prioritas dan perencanaan pembangunan di masing-masing negara. Komitmen pemberian *Aft* harus merupakan komitmen baru dan bukan realokasi komitmen bantuan pembangunan

yang telah ada. Ini demi mencegah agar sektor pembangunan lain tidak terkena dampak negatif dari pengurangan alokasi bantuan melalui skema *AFT*.

Pun dalam *AFT* perlu ada jaminan *predictability* dan *sustainability*. Isu ini sangat terkait dengan realisasi komitmen bantuan, terutama ketika tingkat realisasi sering berada jauh dari nilai yang dijanjikan. Karenanya diperlukan mekanisme *AFT* yang dapat meningkatkan prediktabilitas dan kesinambungan aliran dana bantuan.

Yang tak kalah penting, *AFT* juga mempersyaratkan *monitoring* dan evaluasi. Proses ini berperan menilai efektivitas pelaksanaan *AFT*, baik dari perspektif negara donor maupun perspektif negara penerima. Pun langkah ini bisa mendorong transparansi implementasi bantuan dan dikaitkan dengan komitmen yang telah dijanjikan negara donor. (*doy*)

(*Sumber: PTRI Jenewa*)

—Pusat Hubungan Masyarakat, Departemen Perdagangan—
—021-23528400, pusathumas@depdag.go.id—